

KERTAS KERJA
AURIGA NUSANTARA

Korupsi dan Fenomena Dinasti Politik di Kalimantan Timur

Herdiansyah Hamzah

4/2020





Auriga Nusantara

**Korupsi dan Fenomena
Dinasti Politik di Kalimantan Timur**

Herdiansyah Hamzah

4/2020

Kertas Kerja ini merupakan hasil kajian para peneliti atau akademisi yang diminta oleh Auriga Nusantara. Apabila terdapat materi atau sumber di dalam tulisan ini yang tidak memenuhi kaidah atau standar penulisan sebagaimana yang sudah ditentukan, tanggung jawab berada pada penulis atau di luar tanggung jawab Auriga secara kelembagaan. Hak cipta (*copyrights*) berada pada penulis dan Auriga Nusantara.

Pengutipan: Herdiansyah Hamzah, *Korupsi dan Fenomena Dinasti Politik di Kalimantan Timur*, Kertas Kerja 4/2020, Auriga Nusantara, Jakarta, 2020.

©2020 Herdiansyah Hamzah

Tim Redaksi:

Mumu Muhajir

Erwin Natosmal Oemar

Putut Aryo Saputro

C. Bregas Pranoto

Penata letak & desain: Taqi

Auriga Nusantara

Jakarta Selatan/auriganusantara@org.id

Abstrak



Herdiansyah Hamzah

*Dosen dan Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman*

Daftar Isi

I.	Pendahuluan	1
II.	Kerangka Teori Dinasti	3
III.	Analisis	7
IV.	Kesimpulan	16



Korupsi dan Fenomena Dinasti Politik di Kalimantan Timur

I. Pendahuluan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur pada awal Juli 2020 lalu mengonfirmasi betapa rentannya dinasti politik (*political dynasty*) terhadap tindak pidana korupsi. Dalam OTT tersebut, Bupati Kutai Timur, Ismunandar, ditangkap bersama istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur.¹ Selain Ismunandar dan isterinya, KPK juga menetapkan 3 (tiga) orang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tersangka, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur, Musyaffa; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur, Suriansyah; dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Timur, Aswandini.² Musyaffa dan Suriansyah sendiri merupakan kakak-beradik yang sedarah.³ Ismunandar dan istrinya, serta 3 Kepala OPD tersebut, diduga menerima suap dari dua kontraktor, yakni Aditya Maharani dan Deky Ariyanto, rekanan yang mendapatkan proyek di Kutai Timur.⁴

¹ Kompas.com, "OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/04/06432981/ott-bupati-ketua-dprd-kutai-timur-suami-istri-tersangka-korupsi?page=all>, Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 21.21 Wita.

² Ibid.

³ Selasar.co, "Suami-Istri dan Kakak-Adik Ini Diamankan Terkait OTT KPK Di Kutim", <https://selasar.co/read/2020/07/03/2247/suami-istri-dan-kakak-adik-ini-diamankan-terkait-ott-kpk-di-kutim>, Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 21.28 WITA.

⁴ Tempo.co, "KPK Geledah 5 Tempat Terkait OTT Bupati Kutai Timur", <https://nasional.tempo.co/read/1363515/kpk-geledah-5-tempat-terkait-ott-bupati-kutai-timur/full&view=ok>, Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 21.37 WITA.

Kasus OTT KPK terhadap Ismunandar dan istrinya di Kutai Timur ini menambah daftar dinasti politik yang terjerat kasus korupsi. Sebelum kasus OTT yang melibatkan dinasti politik di Kutai Timur ini, setidaknya sudah terdapat sekurang-kurangnya enam (6) dinasti politik yang terlibat dalam pusaran korupsi, antara lain: Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten, Syauckani Hassan Rais di Kabupaten Kutai Kartanegara, Atty Suharti di Kota Cimahi, Fuad Amin Imron di Kabupaten Bangkalan, Sri Hartini di Kabupaten Klaten, dan Yan Anton Ferdian di Kabupaten Banyuwasin.⁵ Selama satu dekade belakangan ini, tren politik dinasti di tingkat daerah memang cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 2010-2014, terdapat 61 daerah yang menerapkan praktik politik dinasti. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan, bahkan saat ini sudah mencapai 117 atau sekitar 21 persen dari jumlah daerah otonom kita.⁶ Merujuk data Kementerian Dalam Negeri, praktek politik dinasti tersebar merata di seluruh Indonesia, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.⁷

Diskursus mengenai dinasti politik sendiri kerap kali dikunci hanya kepada aspek normatif. Dibatasi hanya kepada kesimpulan boleh dan tidak boleh. Padahal banyak dimensi yang bisa kita potret dalam sebuah sistem politik yang melanggengkan pendekatan berdasarkan garis keturunan tersebut. Oleh karena itu, perdebatan mengenai boleh dan tidak boleh dianggap telah selesai pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU- XIII/2015.⁸ Putusan MK tersebut telah memberikan landasan *legal formal* terhadap keberadaan dinasti politik di Indonesia, khususnya dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK ini didasari oleh pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), yakni demi mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif dalam Pilkada. Sebab hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun meski secara normatif tidak dilarang, politik dinasti tetaplah dianggap tidak memenuhi “*syarat etik*” di dalam sistem pemerintahan. Pendekatan berdasarkan politik kekerabatan dalam penentuan jabatan-jabatan publik (*official elected*) merupakan sesuatu yang dianggap penuh dengan aroma konflik kepentingan.

⁵ Kompas.com, “6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua?page=all>. Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 21.44 WITA.

⁶ Republika.co.id, “Cengkeram Korupsi Di Daerah Politik Dinasti”, <https://republika.co.id/berita/ad2p4c328/cengkeram-korupsi-di-daerah-politik-dinasti>. Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 21.54 WITA.

⁷ Kemendagri.go.id, “Kemendagri: Dinasti Politik Semakin Meluas”, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/11872/kemendagri-dinasti-politik-semakin-meluas>. Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 21.55 WITA.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIII/2015 ini dapat diunduh dalam tautan berikut: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/33_PUU-XIII_2015.pdf. Diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul 23.20 WITA.

Di Kalimantan Timur sendiri, perkembangan dinasti politik cenderung menunjukkan grafik peningkatan yang cukup tajam dalam 10 (sepuluh) tahun belakangan. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan kecenderungan dominasi, baik terhadap kekuasaan maupun sumber daya ekonomi, oleh klan politik tertentu. Di samping itu, kasus OTT KPK yang melibatkan dinasti politik Ismunandar di Kabupaten Kutai Timur, yang sebelumnya didahului oleh dinasti politik Syaukani Hasan Rais di Kabupaten Kutai Kartanegara, menghadirkan kembali diskursus tentang seberapa erat keterhubungan antara dinasti politik dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tulisan ini hendak menganalisis dua (2) isu penting secara sederhana, yakni: *Pertama*, faktor apa yang menyebabkan berkembangnya dinasti politik di Kalimantan Timur? Apa aspek yang memengaruhi keberadaan dinasti politik di Kalimantan Timur, yang belakangan ini menunjukkan grafik peningkatan yang cukup signifikan? *Kedua*, bagaimana hubungan antara korupsi dan politik dinasti? Apakah dinasti politik memiliki karakteristik yang cenderung mendorong para aktor-aktornya untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi?

II. Kerangka Teori Dinasti Politik

Dinasti Politik kerap kali disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Mulai dari “*dinasti politik*”, “*politik dinasti*”, “*keluarga politik*”, hingga “*politik kekerabatan*”. Pada intinya, istilah-istilah tersebut memiliki kesamaan jika merujuk kepada konteks pembahasannya, yakni kekuasaan yang secara turun temurun diwariskan kepada satu kelompok keluarga yang umumnya berdasarkan hubungan sedarah. Namun, secara harfiah, terdapat perbedaan terminologi antara dinasti politik dengan politik dinasti. Dinasti politik atau keluarga politik merujuk kepada entitas politik yang cenderung sudah matang (*established*), sedangkan politik dinasti atau politik kekerabatan merujuk kepada pilihan pendekatan yang digunakan oleh entitas politik yang relatif baru atau pertama kali muncul (*emerging*). Namun kedua peristilahan tersebut, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ibarat keping mata uang, kedua sisinya saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Dalam banyak literatur, dinasti politik sendiri dipahami sebagai kemampuan suatu keluarga untuk mewariskan kekuasaannya secara turun temurun. Jemma Purdey misalnya (dengan merujuk McCoy, 2002 dan Teehankee, 2001), mendefinisikan politik dinasti sebagai berikut: “*Political dynasty refers to the ability of a family to inherit and to accumulate power and wealth from one generation to the next and frequently functions across a variety of political systems and across time*”⁹

⁹ Purdey, J., *Political families in Southeast Asia*. *South East Asia Research*, 24(3), 2016, hlm. 319–327. <https://doi.org/10.1177/0967828X16659027>. Dapat diunduh melalui link berikut ini:

(Dinasti politik mengacu pada kemampuan sebuah keluarga untuk mewarisi dan mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan seringkali berfungsi di berbagai sistem politik dan lintas waktu).¹⁰

Park Seung Woo memberikan pengertian dinasti politik sebagai berikut: *"In general, the term "political dynasties" is defined as traditional political families or the practices by these political families of monopolizing political power and public offices from generation to generation and treating the public elective officers almost as their personal property"*¹¹ (Secara umum, istilah "dinasti politik" didefinisikan sebagai keluarga politik tradisional atau praktik keluarga politik yang memonopoli kekuasaan politik dan jabatan publik dari generasi ke generasi dan memperlakukan petugas pemilihan umum hampir sebagai milik pribadi mereka).¹² William R. Adan, seorang pensiunan profesor dan mantan rektor Universitas Negeri Mindanao, Filipina, mendefinisikan dinasti politik sebagai berikut: *"Political dynasty is about the ownership and the control in the distribution of power and the economic benefits of a politically defined area"*¹³ (Dinasti politik adalah tentang kepemilikan dan kontrol dalam distribusi kekuasaan dan manfaat ekonomi dari suatu wilayah yang ditentukan secara politik).¹⁴

Keluarga politik tentu tidak serta merta menjadi dinasti politik. Terdapat prasyarat tertentu untuk menyebut suatu keluarga politik sebagai dinasti politik. Karena itu, Andrew J. Masigan dalam sebuah opininya di *Business World* yang berjudul *"Evils of Political Dynasties"*, memberikan pendapatnya sebagai berikut: *"When does a political family become a political dynasty? A political dynasty is established in two instances. First, when an elected government official is succeeded by a member of his household up to the first degree of consanguinity or affinity. Second, when several members of a family occupy various positions in government simultaneously"*¹⁵ (Kapan keluarga politik menjadi dinasti politik? Dinasti politik didirikan dalam dua contoh.

<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0967828X16659027>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 Pukul 21.50 WITa.

¹⁰ Terjemahan bebas oleh penulis.

¹¹ Park Seung Woo, *Oligarchic Democracy in the Philippines: Democratization Sans Disintegration of Political Monopoly*. In *States of Democracy: Oligarchic Democracies and Asian Democratization*, edited by Cho Hee Yeon, Lawrence Surendra, and Eunhong Park., Earthworm Books, Mumbai, 2008, hlm. 117-136.

¹² Terjemahan bebas oleh penulis.

¹³ Mindanews.com, *"Turning Point: Political Dynasty, Corruption And Poverty"*, <https://www.mindanews.com/mindaviews/2018/12/turning-point-political-dynasty-corruption-and-poverty/>, Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 Pukul 21.58 WITa.

¹⁴ Terjemahan bebas oleh penulis.

¹⁵ Bworldonline.com, *'Evils Of Political Dynasties'*, <https://www.bworldonline.com/evils-of-political-dynasties/>, Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 Pukul 22.58 WITa.

Pertama, ketika pejabat pemerintah terpilih digantikan oleh anggota rumah tangganya sampai tingkat kerabat atau afinitas pertama. *Kedua*, ketika beberapa anggota keluarga menduduki berbagai posisi dalam pemerintahan secara bersamaan).¹⁶

Dinasti Politik sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Di Amerika Serikat (AS), klan politik Kennedy dan Bush adalah dua dinasti politik yang berkuasa selama beberapa periode. Bahkan klan politik Bush melahirkan dua presiden AS sekaligus, yakni George Herbert Walker Bush (Presiden ke-41) dan George Walker Bush (Presiden ke-43). Selain presiden, klan politik Bush juga turut melahirkan gubernur negara bagian, direktur CIA, senator, hingga banker.¹⁷ Di belahan bumi lainnya, dinasti politik juga berlangsung sejak lama. Di India, dunia tidak akan mungkin lupa dengan tujuh generasi dinasti politik Nehru-Gandhi.¹⁸ Di Filipina, kita juga tidak boleh mengabaikan klan politik tersohor, mulai dari Aquino, Marcos, Arroyo, Binay, Duterte, hingga Roxas.¹⁹ Jadi dinasti politik sudah berlangsung sejak lama. Bahkan menurut Menurut Dal Bó *dkk*, di Amerika Serikat, prevalensi dinasti di kalangan legislator memang tinggi ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain.²⁰ Dalam sistem politik di Asia Tenggara, dinasti politik memiliki tempat yang sangat mengakar. Hal tersebut diungkapkan Jemma Purdey sebagai berikut, “*The political family has an entrenched place within the modern political systems of South East Asian states. Current and former national leaders of the Philippines, Thailand, Indonesia and Singapore are members of political dynasties and else where in the region family networks play central roles in the political lives of these nations*”²¹ (Keluarga politik memiliki tempat yang mengakar dalam sistem politik modern negara-negara Asia Tenggara. Pemimpin nasional Filipina, Thailand, Indonesia, dan Singapura saat ini dan sebelumnya adalah anggota dinasti politik dan di tempat lain di kawasan ini, jaringan keluarga memainkan peran sentral dalam kehidupan politik negara-negara ini).²²

¹⁶ Terjemahan bebas oleh penulis.

¹⁷ Wikipedia.org, “*Keluarga Politik*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_politik, Diakses pada tanggal 15 September 2020 Pukul 14.56 WITa.

¹⁸ Okezone.com, “*Tujuh Turunan Dinasti Politik Nehru-Gandhi Di India*”, <https://news.okezone.com/read/2016/02/11/18/1309300/tujuh-turunan-dinasti-politik-nehru-gandhi-di-india>, Diakses pada tanggal 15 September 2020 Pukul 15.02 WITa.

¹⁹ Wikipedia.org, “*Political dynasties in the Philippines*”, https://en.wikipedia.org/wiki/Political_dynasties_in_the_Philippines, Diakses pada tanggal 15 September 2020 Pukul 16.17 WITa.

²⁰ Ernesto Dal Bó, Pedro Dal Bó, and Jason Snyder, *Political Dynasties*, The National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper Series, Cambridge, Massachusetts, 2007, Dapat diunduh di: <https://www.nber.org/papers/w13122.pdf>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2020 Pukul 06.41 WITa.

²¹ Purdey, J. (2016)., *Op.Cit.*

²² Terjemahan bebas oleh penulis.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Farida Jalalzai dan Meg Rincker pada 2018 menemukan fakta bahwa satu dari sepuluh pejabat eksekutif di seluruh dunia merupakan milik keluarga politik (*belonging to a political family*).²³ Studi ini menganalisis latar belakang dari 1.029 pejabat eksekutif, terutama presiden dan perdana menteri, yang menjabat antara tahun 2000-2017. Sebanyak 119 orang atau sekitar 12% dari total 1.029 pejabat eksekutif tersebut memiliki relasi kekeluargaan dengan klan politik tertentu. Berdasarkan wilayah, Eropa dan Amerika Latin memiliki persentase tertinggi, yakni sekitar 13%, disusul Asia sekitar 11%, dan Afrika Sub-Sahara sekitar 9%.²⁴ Berikut ini adalah tabulasi pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wilayah.

Tabel 1. Executive Office Holders by Regions

Region	Number (%)	Office Holders With Family Ties	Percent Office Holders With Family Ties
Europe	417 (41)	54	13
Sub-Saharan Africa	312 (30)	29	9
Asia	204 (20)	23	11
Latin America	88 (9)	11	13
North America	8 (0)	2	25
Total	1029 (100)	119	12

Sumber: Farida Jalalzai dan Meg Rincker (2018)

²³ Jalalzai, Farida, and Rincker, Meg, *Blood is Thicker than Water: Family Ties to Political Power Worldwide*. *Historical Social Research* 43 (4), 2018, hlm. 54-72.
<https://doi.org/10.12759/hsr.43.2018.4.54-72>.

²⁴ Ibid.

III. Analisis

1. Faktor Penyebab Berkembangnya Dinasti Politik di Kalimantan Timur

Dinasti politik di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam satu dekade belakangan ini. Setelah dinasti politik Syaukani Hasan Rais²⁵ cenderung memudar pasca anaknya, Rita Widyasari,²⁶ juga tersangkut kasus korupsi, dinasti politik di Kalimantan Timur bukannya berkurang, namun malah semakin masif. Berdasarkan data yang diolah dari berbagai macam sumber, setidaknya terdapat 7 (tujuh) dinasti politik yang mendominasi panggung politik di Kalimantan Timur. Dinasti politik mendominasi lembaga-lembaga politik baik yang ada. Mulai dari kepala daerah, DPR, DPD, dan DPRD. Aktor-aktor dinasti politik di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Dinasti Politik di Kalimantan Timur

No	Aktor	Relasi Kekeluargaan	Jabatan	Partai	Ket.
1	Ismunandar	Suami	Bupati Kutai Timur	Nasdem	Terpilih untuk masa jabatan 2016-2021
	Encek UR Fargasih	Istri	Ketua DPRD Kutai Timur	PPP	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
	Siti Rizky Amalia	Anak	Anggota DPRD Kaltim	PPP	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
2	Neni Moerniaeni	Ibu	Walikota Bontang	Golkar	Terpilih untuk masa jabatan 2016-2021
	Andi Faisal Sofyan Hasdam	Anak	Ketua DPRD Bontang	Golkar	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
3	Yusriansyah Syarkawi	Ayah	Bupati Paser	Golkar	Terpilih untuk masa jabatan 2016-2021
	Hendra Wahyudi	Anak	Ketua DPRD Paser	PKB	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
	Yenni Eviliana	Menantu (Istri Hendra Wahyudi)	Anggota DPRD Kaltim	PKB	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
4	Rudi Mas'ud	Adik	Anggota DPR-RI	Golkar	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
	Hasanuddin Mas'ud	Kakak	Anggota DPRD Kaltim	Golkar	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024

²⁵ Syaukani Hasan Rais adalah Bupati Kutai Kartanegara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2006 di periode kedua jabatannya.

²⁶ Rita Widyasari, adalah anak Syaukani Hasan Rais, yang juga menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2017 di periode kedua jabatannya.

	Rahmad Mas'ud	Kakak	Wakil Walikota Balikpapan	Golkar	Terpilih untuk masa jabatan 2016-2021
	Abdul Gafur Mas'ud	Adik	Bupati Penajam Paser Utara	Demokrat	Terpilih untuk masa jabatan 2018-2023
5	Mahyuddin	Kakak	Anggota DPD-RI	-	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
	Mahyunadi	Adik	Anggota DPRD Kaltim	Golkar	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
	Maswar	Adik	Anggota DPRD Kutai Timur	Golkar	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
	Marsidik	Adik	Anggota DPRD Kutai Timur	Golkar	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
6	Awang Faroek Ishak	Ayah	Anggota DPR-RI	Nasdem	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
	Awang Ferdian Hidayat	Anak	Anggota DPD-RI	-	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
	Rima Hartati	Menantu (Istri Awang Ferdian Hidayat)	Anggota DPRD Kaltim	PPP	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024
7	Syahrie Jaang	Suami	Walikota Samarinda	Demokrat	Terpilih untuk masa jabatan 2016-2021
	Puji Setyowati	Istri	Anggota DPRD Kaltim	Demokrat	Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024

Sumber: disaring dari berbagai sumber.

Apabila dikelompokkan, terdapat dua klasifikasi model dinasti politik di Kalimantan Timur, yakni: *Pertama*, dinasti politik yang berada di dalam satu wilayah yang sama, namun memegang jabatan di lembaga politik yang berbeda. Sebagai contoh, fenomena ini terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Sebelum Ismunandar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara OTT dugaan korupsi, istrinya yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, juga turut diamankan oleh KPK,²⁷ Klan politik Ismunandar mengendalikan pemerintah daerah, sekaligus memegang kendali terhadap DPRD pada saat yang bersamaan. Selain di Kabupaten Kutai Timur, fenomena serupa juga terjadi di dua daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kota Bontang dan Kabupaten Paser. Di Kota Bontang, walikota saat ini dijabat oleh Neni Moerniaeni, sedangkan anaknya, Andi

²⁷ Anak Ismunandar yang bernama Siti Rizky Amalia, pada periode yang sama juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kalimantan Timur mewakili PPP dalam masa jabatan 2019-2024.

Faisal Sofyan Hasdam, menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bontang. Uniknya, saat suaminya, Sofyan Hasdam, menjabat sebagai Walikota Bontang Periode Kedua untuk masa jabatan 2006-2011, Neni Moerniaeni justru menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bontang. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Paser, di mana bupati saat ini dijabat oleh Yusriansyah Syarkawi, namun pada saat bersamaan, Ketua DPRD Paser justru dijabat oleh anaknya sendiri, Hendra Wahyudi.²⁸ Begitu pun dengan mantan Gubernur Kalimantan Timur dua periode, Awang Faroek Ishak, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR-RI mewakili Partai Nasdem. Pada saat yang bersamaan, anaknya Awang Ferdian Hidayat, menjabat sebagai anggota DPD-RI mewakili Kalimantan Timur.²⁹

Kedua, dinasti politik yang berada dalam wilayah yang berbeda juga memegang jabatan di lembaga politik yang berbeda. Klan politik Mas'ud Bersaudara misalnya. Rudi Mas'ud, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, saat ini menjabat sebagai Anggota DPR-RI. Sementara kakaknya, Hasanuddin Mas'ud, menjabat sebagai Anggota DPRD Kalimantan Timur, yang juga mewakili Partai Golkar. Pada saat yang bersamaan, dua saudaranya yang lain justru menjabat di tingkat pemerintah daerah. Rahmad Mas'ud menjabat sebagai Wakil Walikota Balikpapan, sedangkan Abdul Gafur Mas'ud menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara.

Hal yang sama juga terjadi di keluarga M Bersaudara, yang berasal dari Kutai Timur. Mahyuddin, adalah anggota DPD-RI, sementara ketiga adiknya, yakni Mahyunadi, Maswar, dan Marsidik, terpilih sebagai anggota DPRD. Mahyunadi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan baik Maswar dan Marsidik sama-sama menjabat di tingkat Kabupaten Kutai Timur. Begitu pun dengan Syahrie Jaang, yang saat ini menjabat sebagai Walikota Samarinda. Puji Setyowati, istri ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur ini, pada saat yang bersamaan menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur mewakili partai yang sama dalam masa jabatan 2019-2024.

Pertanyaan pokoknya adalah: apa faktor penyebab berkembangnya dinasti politik di Kalimantan Timur? Terdapat beberapa hal krusial yang menentukan makin suburnya dinasti politik di Kalimantan Timur, antara lain: *Pertama*, kelembagaan partai politik yang tidak demokratis. Bukan

²⁸ Menantu Yusriansyah Syarkawi, yang bernama Yenni Eviliana, yang juga sekaligus istri dari Hendra Wahyudi, pada periode yang sama menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur mewakili PKB masa jabatan 2019-2024.

²⁹ Menantu Awang Faroek Ishak, yang bernama Rima Hartai, yang juga sekaligus istri dari Awang Ferdian Hidayat, pada periode yang sama menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur mewakili PPP masa jabatan 2019-2024.

hanya dalam soal proses pengambilan kebijakan dalam tubuh partai politik yang cenderung dimonopoli oleh kelompok tertentu, tetapi juga dalam soal “*gagalnya*” partai politik menjalankan fungsinya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. Sebagai contoh, dalam kontestasi Pilkada, keputusan pencalonan kepala daerah hanya ditentukan oleh segelintir elit dalam tubuh partai politik. Kondisi yang tidak demokratis ini menyebabkan kendali kebijakan partai politik hanya berada di satu kelompok saja. Hal inilah yang menjadi embrio langgengnya dinasti politik dalam tubuh partai politik. Lantas kenapa dinasti politik berkepentingan dengan partai politik? Jika melihat pengalaman 2 (dua) klan dinasti politik di Kalimantan Timur, yang terpilih sebagai bupati dan walikota dalam Pilkada tahun 2015, mereka tidak mencalonkan diri melalui jalur partai politik. Baik Rita Widayari maupun Neni Moerniaeni, sama-sama mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Namun uniknya, setelah mereka berdua dilantik dan secara resmi menduduki jabatan bupati dan walikota, maka gerilya perebutan pengaruh di partai politik pun dimulai. Ini menandakan bahwa alat konsolidasi kekuasaan serta akses terhadap keseluruhan sumber daya jauh lebih efektif melalui partai politik. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ernesto Dal Bó, *dkk*, yang menyebutkan bahwa, “*ketika suatu partai dengan aman mengontrol suatu negara, mereka yang ada di dalamnya akan dengan mudah mengendalikan dan mengontrol dukungan kepada calon yang berhubungan dengan keluarga atau relasi sosialnya.*”³⁰

Kedua, minimnya kapasitas partai politik dalam membangun kemandirian keuangan organisasi. Hal ini memberikan ruang dominasi kepada kelompok yang memiliki sumber daya finansial yang matang. Hampir semua partai politik pada hari ini dikuasai oleh kelompok oligarki, kelompok yang secara ekonomi memang memadai. Kelembagaan partai politik yang tidak demokratis, sebagaimana yang diurai dalam poin pertama di atas, juga turut diperparah dengan desain keuangan partai politik yang timpang, sehingga membuka jalan monopoli kuasa oleh kelompok oligarki yang memiliki sumber daya finansial yang kuat. Pada akhirnya, monopoli kekuasaan berdasarkan kemampuan finansial inilah yang akan memupuk berkembangnya dinasti politik. *Ketiga*, faktor regulasi yang memungkinkan konsolidasi dinasti politik. Beratnya syarat pencalon dalam Pilkada misalnya, membuat pintu masuk menjadi terbatas dan hanya memungkinkan diakses oleh kelompok kekerabatan tertentu

³⁰ Ernesto Dal Bó, Pedro Dal Bó, and Jason Snyder (2007)., *Op.Cit.*

saja.³¹ Hal ini selaras dengan biaya politik yang tinggi, seperti “*mahar pencalonan*”, yang juga hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya finansial yang memadai. Pintu inilah yang memberikan ruang konsolidasi bagi dinasti politik.

Keempat, kesadaran politik rakyat yang masih sangat rendah dan cenderung mengambang (*floating mass*). Akibatnya, tidak ada semacam “*kontrol sosial*” terhadap dominasi klan politik tertentu. Logika sederhananya, dinasti politik akan terus menguat seiring dengan lemahnya kontrol publik. Ketiadaan kontrol sosial ini berdampak pada tidak berjalannya mekanisme *check and balances system*, baik dalam tubuh partai politik maupun dalam relasi antara lembaga-lembaga politik yang ada di daerah. Namun jika ditarik benang merahnya, kesadaran politik yang relatif masih rendah ini juga turut disumbang oleh absennya partai politik dalam melakukan pendidikan politik yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya secara penuh.

Kelima, masih kuatnya budaya feodal dalam tataran masyarakat kita. Hal tersebut ditandai dengan masih kuatnya relasi patron-klien, *agent-principal*, dan sejenisnya. Budaya feodal ini berdampak kepada iklim yang tidak demokratis dalam dinamika sosial-politik masyarakat. Termasuk dalam tradisi politik, di mana klan kekerabatan tertentu berpotensi diasosiasikan sebagai “*wakil tuhan*” yang sulit dikritik apalagi dibantah. Situasi ini turut membantu langgengnya dinasti politik.

2. Hubungan Antara Korupsi dan Dinasti Politik

Apakah suatu dinasti politik sudah pasti korup? Belum tentu. Tapi bahwa dinasti politik memiliki kecenderungan korup, rasanya sulit dibantah. Apakah hipotesa ini benar? Mari kita uji secara singkat dalam uraian berikut. Pada prinsipnya, dinasti politik memberikan ruang dan menyediakan jalan bagi korupsi. Terlebih jika dinasti politik itu lahir dan berkembang biak secara prematur. Seorang politisi yang lahir dari klan politik tertentu tanpa ditempa dengan pengalaman dan proses kaderisasi yang memadai maka sudah bisa dipastikan ia lahir dari modal finansial yang besar, bukan dari tradisi politik yang mengakar di akar rumput. Oleh karena itu, ia begitu rentan dengan korupsi dalam upaya menjaga dan merawat kekuasaannya di kemudian hari.

³¹ Syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara sah, termasuk juga syarat pencalonan melalui jalur perseorangan, membuat akses pencalonan dalam Pilkada menjadi terbatas, dan hanya bisa diakses oleh klan politik tertentu.

Namun dalam beberapa kasus, dinasti politik juga butuh membangun citra yang seolah-olah mengasosiasikan dirinya bersih dari korupsi. Dalam disertasinya yang berjudul “*Essays on Political Dynasties: Evidence from Empirical Investigations*”, Ashikur Rahman memberikan penjelasan bahwa hubungan antara korupsi dan dinasti politik yang cenderung ambigu secara teoritis. Di satu sisi, dinasti politik akan sangat dipengaruhi oleh insentif pembangunan reputasi (*reputation building incentive*). Insentif ini menunjukkan bahwa selama menjabat, anggota dinasti politik akan berusaha untuk tidak melakukan kegiatan korupsi karena mereka ingin menciptakan reputasi yang positif bagi keluarga mereka.³² Rahman menuliskan pendapatnya sebagai berikut:

*“As I will argue below, theoretically the overall relationship between dynasty-politics and corruption is ambiguous. More specifically, dynastic politicians who desire dynastic succession at the highest political office can be influenced by what I call the ‘reputation-building’ incentive. This incentive suggests that members of political dynasties, while they are in office, will try to abstain from corrupt activities since they would want to create a positive reputation for their family. Besides, this positive reputation will act as a signal to the people that their family is in politics to serve the public interest. As a result, if this incentive is strong, then it is likely that dynasty-politics is associated with lower levels of corruption across countries.”*³³ (Seperti yang akan saya katakan di bawah, secara teoritis hubungan keseluruhan antara dinasti-politik dan korupsi adalah ambigu. Lebih khusus lagi, politisi dinasti yang menginginkan suksesi dinasti di jabatan politik tertinggi dapat dipengaruhi oleh apa yang saya sebut insentif 'pembangunan reputasi'. Insentif ini menunjukkan bahwa anggota dinasti politik, selama mereka menjabat, akan berusaha untuk tidak melakukan kegiatan korupsi karena mereka ingin menciptakan reputasi yang positif bagi keluarga mereka. Selain itu, reputasi positif ini akan menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa keluarganya terjun ke politik untuk melayani kepentingan umum. Akibatnya, jika insentif ini kuat, kemungkinan dinasti-politik dikaitkan dengan tingkat korupsi yang lebih rendah di berbagai negara).³⁴

³² Ashikur Rahman, *Essays on Political Dynasties: Evidence from Empirical Investigations*. Ph.D thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE), 2013, hlm. 88. Dokumen ini dapat diunduh melalui link berikut: <http://etheses.lse.ac.uk/605/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 Pukul 06.16 WITA.

³³ Ibid.

³⁴ Terjemahan bebas dari penulis.

Bertentangan dengan insentif pembangunan reputasi, dinasti politik juga sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut Rahman sebagai insentif menimbun kekayaan (*stockpiling wealth incentive*). Rahman menjelaskan sebagai berikut:

*“In contrary to the reputation-building incentive, dynastic-politician can also be dominated by the ‘stockpiling-wealth’ incentive. This incentive suggests that dynastic-politicians, while they are in office, will use their position to amass a fortune so that their future generations can ‘buy’ their way to office. They can also appoint their preferred people to key positions in the government and bureaucracy (and in the process accumulate political capital) so that the elections contested by their future generations are manipulated in their favour.”*³⁵ (Bertentangan dengan insentif pembangunan reputasi, dinasti-politikus juga dapat didominasi oleh insentif 'menimbun kekayaan'. Insentif ini menunjukkan bahwa dinasti-politisi, saat mereka menjabat, akan menggunakan posisi mereka untuk mengumpulkan kekayaan sehingga generasi masa depan mereka dapat 'membeli' jalan mereka ke kantor. Mereka juga dapat menunjuk orang-orang yang mereka sukai ke posisi kunci dalam pemerintahan dan birokrasi (dan dalam prosesnya mengakumulasi modal politik) sehingga pemilihan yang diperebutkan oleh generasi masa depan mereka dimanipulasi untuk keuntungan mereka).³⁶

Kecenderungan dinasti politik yang rakus dalam mengakumulasi modal politik dan terutama finansial berdampak kepada kekuasaan yang korup. Kendati pun reputasi coba dibangun sebaik mungkin, namun watak sejatinya yang korup sulit untuk disembunyikan. Karena alasan ini pula, Rahman menyebut bahwa negara-negara dengan prevalensi politik dinasti yang lebih tinggi, rata-rata cenderung lebih korup.³⁷ Rahman menjelaskan sebagai berikut:

“Countries with influential political dynasties (or at least with immediate dynastic successions at the highest political office) are on average more corrupt. Likewise, this message is difficult to reconcile with the reputation-building story but it lends some support to stockpiling-wealth incentive which suggests that dynastic politicians will pursue succession in the political arena through developing

³⁵ Ibid.

³⁶ Terjemahan bebas dari penulis.

³⁷ Ibid.

political machineries and accumulating financial capital."³⁸ (negara-negara dengan dinasti politik yang berpengaruh (atau setidaknya dengan suksesi dinasti langsung di jabatan politik tertinggi) rata-rata lebih korup. Demikian pula, pesan ini sulit untuk didamaikan dengan cerita pembangunan reputasi tetapi memberikan dukungan untuk insentif penimbunan kekayaan yang menunjukkan bahwa politisi dinasti akan mengejar suksesi di arena politik melalui pengembangan mesin politik dan mengumpulkan modal finansial).³⁹

Dinasti politik tidak bisa dipungkiri memberikan ruang yang besar terhadap korupsi. Menurut Beatriz Paterno, setidaknya terdapat tiga alasan mendasar mengapa dinasti politik harus dibatasi, yakni: *Pertama*, dinasti politik merusak sistem *check and balances*. *Kedua*, sentralitas dinasti ke politik menurunkan biaya yang terkait dengan tindakan korupsi. *Ketiga*, keberhasilan keluarga politik yang terus berlanjut meskipun tuduhan korupsi melemahkan supremasi hukum, dan melanggengkan sistem korupsi di pemerintahan.⁴⁰ Jika kita bercermin dari kasus OTT KPK di Kabupaten Kutai Timur, maka hipotesis tentang implikasi dinasti politik yang merusak *check and balances system* menemukan dasar pembenar. Di saat Ismudar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan istrinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur pada masa jabatan yang bersamaan, maka desain pengawasan terhadap kinerja lembaga menjadi benar-benar lumpuh. Salah satunya dalam hal pengawasan lalu lintas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari hulu ke hilir. Semua kebijakan terhadap postur APBD, bisa jadi diselesaikan di dalam kamar, bukan di ruang-ruang publik sebagaimana mestinya. Jikalau pun pengawasan itu berjalan secara kasat mata, itu hanya dalam bentuk prosedur formal semata.

Di lain sisi, dalam situasi di mana dinasti politik berkembang secara masif dan jauh lebih kuat, maka akan membuat pengusutan kasus-kasus korupsi jauh lebih sulit. Apa yang terjadi di Filipina menjelaskan kondisi tersebut. *The Catholic Bishops' Conference of the Philippines* (CBCP), yang merupakan kelompok berbasis Gereja paling berpengaruh di negara mayoritas Katolik ini, memberikan pernyataan yang menggambarkan bagaimana dinasti politik telah menyuburkan korupsi di negara tersebut. Pernyataan CBCP dimuat dalam *Gulf News*, koran berbahasa Inggris yang berbasis di UEA sebagai berikut: "*The continued dominance of political dynasties in the country makes it more difficult to combat corruption, the*

³⁸ Ibid. Hlm.120.

³⁹ Terjemahan bebas dari penulis.

⁴⁰ Beatriz Paterno, "*The Philippines Must Break the Power of Political Dynasties*", <https://globalanticorruptionblog.com/2014/12/01/the-philippines-must-break-the-power-of-political-dynasties/>. Diakses tanggal 22 Agustus 2020 Pukul 22.27 WITa.

Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP) said. Political dynasties breed corruption and ineptitude, the statement signed by Cebu Archbishop Jose Palma, CBCP president."⁴¹ (Dominasi dinasti politik yang terus berlanjut di negara itu membuatnya lebih sulit untuk memerangi korupsi, kata Konferensi Waligereja Filipina (CBCP). Dinasti politik membiakkan korupsi dan ketidakmampuan, demikian pernyataan yang ditandatangani oleh Uskup Agung Cebu Jose Palma, presiden CBCP).⁴² Di samping itu, dominasi dinasti politik juga memudahkan mereka mengooptasi aktor-aktor gerakan masyarakat sipil. Menurut Tadem dan Tadem, sebagaimana yang dikutip Jemma Purdey, "*Mobilisasi gerakan masyarakat sipil melawan dinasti menjadi lebih sulit karena dalam banyak kasus mereka melakukannya sudah dikooptasi oleh keluarga dinasti melalui kesejahteraan sosial dan distribusi amal.*"⁴³ Kooptasi ini pula yang melemahkan upaya gerakan masyarakat sipil melawan korupsi.

Secara faktual, tertangkapnya dua klan dinasti politik di Kalimantan Timur oleh KPK, yakni mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, dan mantan Bupati Kutai Timur, Ismudar, mengonfirmasi betapa rentannya dinasti politik terhadap praktek korupsi. Dinasti politik dan korupsi memiliki korelasi yang kuat. Dinasti politik memang tidak serta merta korup. Namun dinasti politik condong destruktif dengan menciptakan ketimpangan yang tajam, serta melapangkan jalan terjadinya tindak pidana korupsi. Dinasti politik memiliki kecenderungan yang rakus dalam mengakumulasi kekayaan sebagai bagian dari strategi melanggengkan kekuasaan secara turun temurun. Kecenderungan mengakumulasi kekayaan secara tidak terkontrol inilah yang melahirkan karakter yang korup. Karena dinastik politik tidak hanya memberikan efek ketimpangan dalam distribusi kekuasaan politik, sebagaimana yang disebutkan oleh Dal Bó *dkk*⁴⁴, namun dinasti politik juga membuat akses terhadap sumber daya keuangan di daerah terbatas pada klan politiknya semata. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan penggunaan diskresi yang berlebihan dalam setiap kebijakannya, yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Dengan demikian, karena karakteristiknya yang rentan dengan korupsi tersebut, maka sewajarnya pula KPK dan aparat penegak hukum lainnya memusatkan pengawasannya terhadap keseluruhan aktivitas dinasti politik, khususnya yang ada di daerah-daerah.

⁴¹ Gulfnews.com, "*Political Dynasties Worsen Problem On Corruption*", <https://gulfnews.com/world/asia/philippines/political-dynasties-worsen-problem-on-corruption-1.1139597>. Diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul 23.32 WITA.

⁴² Terjemahan bebas dari penulis.

⁴³ Purdey, J. (2016)., *Op.Cit.*

⁴⁴ Ernesto Dal Bó, Pedro Dal Bó, and Jason Snyder. (2007). *Op.Cit.*

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan sebelumnya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berkembangannya dinasti politik dengan cukup signifikan di Kalimantan Timur, antara lain: *Pertama*, kelembagaan partai politik yang tidak demokratis. *Kedua*, minimnya kapasitas partai politik dalam membangun kemandirian keuangan organisasi. *Ketiga*, faktor regulasi yang memungkinkan konsolidasi dinasti politik. *Keempat*, kesadaran politik rakyat yang masih sangat rendah dan cenderung mengambang (*floating mass*). Dan *kelima*, masih kuatnya budaya feodal dalam tataran masyarakat kita.
2. Dinasti politik dan korupsi memiliki korelasi yang kuat. Dinasti politik memang tidak serta merta korup. Namun dinasti politik condong destruktif dengan menciptakan ketimpangan yang tajam, serta melapangkan jalan terjadinya tindak pidana korupsi. Dinasti politik memiliki kecenderungan yang rakus dalam mengakumulasi kekayaan, sebagai bagian dari strategi melanggengkan kekuasaan secara turun temurun. Kecenderungan mengakumulasi kekayaan secara tidak terkontrol inilah yang melahirkan karakter yang korup. Kendati reputasi coba dibangun sebaik mungkin namun watak sejatinya yang korup tersebut sulit untuk disembunyikan.



4/2020



Auriga Nusantara
Jakarta Selatan
auriganusantara@org.id